



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 7 Juli 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.30 WIB s.d 18.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK. V)
Acara	: Pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA. 2011
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Para Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua membuka rapat pukul 14.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA. 2011.
3. Ketua mempersilakan kepada Sekretaris Jenderal dan para Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya mengenai perubahan RKA Kementerian Perhubungan dalam APBN-P 2011.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan agar pemanfaatan dari penghematan, sisa tender dan tambahan anggaran pada APBN-P 2011 sesuai dengan ketentuan Inpres No. 7 Tahun 2011, diutamakan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dukungan penyelesaian pembangunan secara tuntas agar berfungsi penuh;
 - b. Mendesak dan strategis;
 - c. Dapat dilaksanakan dalam waktu singkat;
 - d. Ditempatkan pada unit kerja *progress* tinggi sebagai bentuk *reward*; dan
 - e. Manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
2. Komisi V DPR RI akan memperjuangkan usulan alokasi anggaran tambahan Kementerian Perhubungan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 2,134 Triliun.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar pemanfaatan anggaran sisa tender dalam satu program di Provinsi yang sama, prioritas kegiatan/sub kegiatannya dibahas dengan Komisi V DPR RI.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dibiayai dengan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sudah selesai dan sedang berjalan.
5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk melengkapi data yang terkait dengan anggaran subsidi terhadap pelayanan angkutan perintis termasuk operator serta jadwal kegiatannya.
6. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memberikan prioritas penambahan anggaran untuk kelancaran angkutan penyeberangan khususnya di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2011

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

MOH. IKSAN TATANG

KETUA RAPAT,

MUHIDIN M. SAID